



## **TANTANGAN BAGI MULTILATERALISME PASCA KTT APEC 2025**

Rizki Roza\*

### **Abstrak**

*Konferensi Tingkat Tinggi APEC ke-32 menghasilkan Deklarasi Gyeongju yang menandai perubahan penting dalam dinamika multilateralisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Tidak dicantumkannya dukungan eksplisit terhadap WTO dalam deklarasi tersebut mencerminkan perubahan signifikan di dalam tubuh APEC. Tulisan ini menganalisis implikasi perkembangan tersebut terhadap masa depan gagasan multilateralisme di kawasan dan terhadap kepentingan Indonesia. Dinamika yang berkembang pada KTT APEC 2025 menegaskan bahwa pergeseran geopolitik dan meningkatnya proteksionisme telah mendorong sebagian negara untuk mengubah pandangannya terhadap sistem perdagangan global. Perkembangan ini menjadi indikator penting yang harus direspons oleh negara-negara di kawasan. Indonesia yang menempatkan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keterbukaan ekonomi dunia, juga perlu merespons perkembangan ini dengan tepat. Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang langkah-langkah diplomatik Indonesia dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan dan menyusun langkah yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan global..*

### **Pendahuluan**

Para pemimpin Asia-Pasifik baru saja berkumpul di Gyeongju, Korea Selatan dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pacific (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) ke-32. Dihadiri 21 negara anggota yang mewakili lebih dari separuh perekonomian dunia, ditutup pada 1 November 2025, pertemuan ini mengadopsi Deklarasi Gyeongju. Dokumen deklarasi tersebut menyebutkan sejumlah komitmen bersama, antara lain menyatakan pengakuan mengenai pentingnya sistem perdagangan dan investasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik, dan komitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi guna menavigasi lingkungan global yang terus berkembang. Namun, deklarasi ini menjadi perhatian banyak pihak terkait hilangnya bahasa yang menegaskan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral di bawah World Trade Organization (WTO). Dukungan terhadap WTO biasanya selalu muncul di dokumen deklarasi bersama APEC sebelumnya (Aprilia, 2025). Perkembangan ini dapat dilihat

\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.roza@dpr.go.id.

sebagai cerminan kesenjangan pandangan perdagangan yang semakin lebar di antara negara-negara ekonomi utama dunia. Relevansi dari prinsip-prinsip multilateral yang menjadi dasar APEC kini dipertanyakan, terutama di tengah gelombang kebijakan proteksionisme beberapa negara.

Indonesia, sebagai bagian dari APEC, dalam berbagai kesempatan secara konsisten menyatakan dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral (Nasution, 2025). Indonesia selalu mendorong APEC untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan melalui kerangka WTO. Perkembangan terkini dari KTT APEC ke-32 dapat berimplikasi serius terhadap posisi Indonesia dan gagasan multilateralisme di kawasan. Tulisan ini menganalisis implikasi hasil pertemuan APEC terhadap gagasan sistem perdagangan multilateral di kawasan, termasuk terhadap kepentingan Indonesia.

### **Komitmen APEC terhadap Multilateralisme**

Kawasan Asia-Pasifik tengah menghadapi ketidakpastian global dan gelombang kebijakan proteksionisme. Untuk menghadapi tantangan ini, sebagian pakar ekonomi, antara lain Peter Drysdale berpandangan bahwa multilateralisme memiliki peran penting untuk menjamin pembangunan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik. Sistem multilateral dinilai telah memungkinkan perekonomian negara-negara di kawasan yang memiliki latar belakang, sumber daya, sistem politik, dan institusi yang sangat berbeda, untuk berkembang melalui perdagangan internasional, investasi, dan transfer teknologi. Multilateralisme dianggap telah menghindarkan ekonomi kawasan dari skema perdagangan yang diskriminatif (Junida, 2025). Presiden Korea Selatan Lee Jae-Myung dalam pidato pembukaan KTT APEC juga menyatakan bahwa Korsel sebagai tuan rumah akan memimpin multilateralisme, dan menekankan bahwa di tengah gelombang proteksionisme dan “*national interest first*”, diperlukan kerja sama kolektif dan keterbukaan (Seungseop, 2025).

APEC dibentuk dengan gagasan utama regionalisme terbuka, yang berlandaskan pada kepatuhan pada prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam beberapa tahun terakhir APEC menghadapi tantangan signifikan di mana aturan-aturannya harus menghadapi intervensi kebijakan dari sejumlah negara. Kemampuan APEC untuk menyelesaikan perbedaan antarnegara melalui kerangka diskusi dan dialog menghadapi ujian penting. APEC sudah pernah gagal mencapai konsensus pada KTT tahun 2018 di Papua Nugini akibat perbedaan pandangan antara AS dan China. Meskipun tidak mencantumkan referensi yang eksplisit terhadap sistem perdagangan multilateral WTO, tercapainya Deklarasi Gyeongju dianggap sebagai keberhasilan Korsel sebagai tuan rumah untuk menjembatani perbedaan antara kekuatan ekonomi yang ada di dalam APEC (Min-ho, 2025).

Selama ini, deklarasi yang diadopsi oleh KTT APEC selalu menyebutkan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan (*rules-based multilateral trading system*),

dengan WTO sebagai intinya. Sejak WTO berdiri pada tahun 1995, APEC selalu memosisikan dirinya sebagai komplementer, bukan pengganti sistem perdagangan global WTO. Deklarasi Osaka yang dihasilkan KTT APEC tahun 1995 merupakan pertama kalinya APEC secara eksplisit menyebut WTO. Baru pada KTT tahun 2018 di Papua Nugini, APEC gagal menghasilkan deklarasi karena terdapat perbedaan pendapat antara AS dan China mengenai komitmen terhadap WTO. Penegasan dukungan APEC terhadap WTO dan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan kembali menguat dalam deklarasi APEC tahun 2021 hingga 2024 (Dong-ha, 2025). Deklarasi Wellington 2021 di antaranya menyebutkan bahwa APEC berkomitmen untuk mereformasi dan memperkuat peran WTO, bukan menggantikannya dengan mekanisme regional. Deklarasi Wellington mencerminkan upaya pemulihan multilateralisme setelah masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump berakhir.

Perdebatan mengenai sistem perdagangan multilateral dan dukungan terhadap WTO kembali mengemuka pada KTT APEC 2025. Deklarasi Gyeongju dicapai melalui konsensus negara-negara anggota APEC setelah melewati perdebatan. Negara-negara APEC sepakat agar investasi dan perdagangan regional harus bermanfaat bagi semua pihak di tengah tantangan ekonomi global. Hilangnya referensi WTO dalam Deklarasi Gyeongju merupakan indikator penting dari realitas geopolitik yang berubah, dan memaksa aktor-aktor di kawasan untuk beradaptasi. Dihasilkan melalui konsensus, deklarasi ini menunjukkan kemunduran dukungan terhadap multilateralisme tradisional, dan kerja sama ekonomi regional untuk saat ini memainkan peran penting untuk menghadapi tantangan global.

### **Pendekatan Multilateralisme bagi Indonesia**

Delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri KTT APEC ke-32. Dalam pidatonya di hadapan forum APEC, Presiden Prabowo menekankan bahwa APEC harus terus menjadi forum kemitraan yang inklusif, terbuka, adil, dan setara. Prabowo juga menyampaikan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan dan perpecahan di dunia yang mengancam stabilitas ekonomi global, kawasan Asia-Pasifik harus menolak fragmentasi, membangun kembali kepercayaan, dan memperkuat solidaritas ekonomi regional. Dalam rangkaian pertemuan APEC, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia masih berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan yang berpusat pada WTO (Kemenkoperekonomian, 2025).

Komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral WTO bukan hal baru. Bagi Indonesia, sistem perdagangan multilateral WTO merupakan fondasi penting bagi stabilitas global. Indonesia berpandangan, keberlanjutan sistem ini akan memastikan setiap negara dapat berkompetisi secara adil, dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan bersama. Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan APEC pada beberapa tahun

terakhir, Indonesia secara konsisten menyuarakan hal ini. Dalam persiapan menuju pertemuan WTO tahun 2024 misalnya, Indonesia mendorong anggota APEC untuk mendukung sistem perdagangan multilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga turut mendukung semua proses perundingan WTO dan mengupayakan berjalannya kembali sistem perdagangan multilateral di WTO. Mengembalikan efektivitas WTO, termasuk langkah penunjukan *Appellate Body*, dan melanjutkan agenda reformasi WTO telah menjadi salah satu prioritas Indonesia bersama anggota APEC lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Indonesia, APEC memiliki potensi besar untuk berkontribusi mengatasi tantangan perdagangan global (Sayekti, 2023).

Dukungan Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan juga diikuti dengan pragmatisme kebijakan ekonomi dalam negeri. Indonesia termasuk dalam kelompok G-33, bersama negara-negara berkembang memperjuangkan perlindungan kebijakan pertanian domestik melalui *special products* dan *special safeguard mechanism* (SSM). Indonesia aktif mendorong reformasi sistem perdagangan WTO agar menjadi lebih adil, inklusif, dan relevan bagi negara berkembang (Rahayu & Djumena, 2025). Ini mencerminkan kesadaran Indonesia bahwa dalam tatanan ekonomi global yang terus berubah, sistem multilateral juga tidak boleh statis. Sebagai bagian dari pendukung sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, Indonesia berusaha berperan untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat memberi keuntungan kepada semua pihak, terutama dengan mendukung reformasi WTO. Namun, dengan perkembangan yang terjadi pada KTT APEC 2025, Indonesia perlu mengkaji ulang langkahnya agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan global dan tetap dapat menempatkan perdagangan internasional sebagai instrumen pembangunan.

## Penutup

Dinamika yang berkembang pada KTT APEC 2025 menegaskan bahwa sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan tengah menghadapi tantangan serius. Pergeseran geopolitik dan meningkatnya proteksionisme telah mendorong sebagian negara untuk mengubah pandangannya terhadap sistem perdagangan global. Ketidadaan dukungan eksplisit terhadap WTO dalam Deklarasi Gyeongju menjadi indikator penting yang harus direspons aktor-aktor di kawasan dengan cermat, termasuk Indonesia. Indonesia yang selama ini menempatkan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keterbukaan ekonomi dunia, juga harus mampu merespons perkembangan ini dengan tepat.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang langkah-langkah diplomatik Indonesia dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan. Pemerintah perlu menyusun langkah yang lebih adaptif dengan dinamika perdagangan global pasca KTT APEC 2025 agar perdagangan internasional dapat tetap menjadi salah satu instrumen pembangunan Indonesia.

## Referensi

- Aprilia, Z. (2025, November 1). WTO hilang dari Deklarasi Gyeongju KTT APEC 2025, pertanda apa? *CNBCIndonesia.com*  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20251101155211-4-681343/wto-hilang-dari-deklarasi-gyeongju-ktt-apec-2025-pertanda-apa>
- Dong-ha, K. (2025, November 3). APEC Declaration omits WTO reference, reflecting trade shift. *TheChosunDaily*. <https://www.chosun.com/english/national-en/2025/11/01/OCCLI4Z7KNDDPP4TFN3J6MYTXQ>
- Junida, A. I. (2025, Oktober 27). Ekonom sebut multilateralisme krusial bagi pembangunan Asia-Pasifik. *Antaranews.com*.  
<https://www.antaranews.com/berita/5202705/ekonom-sebut-multilateralisme-krusial-bagi-pembangunan-asia-pasifik>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, November 1). Siaran Pers: Seruan Indonesia di KTT APEC 2025: Saatnya Membangun Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Terbuka, Adil, Inklusif dan Berpusat pada Rakyat. *Ekon.go.id*  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6636/seruan-indonesia-di-ktt-apec-2025-saatnya-membangun-kerja-sama-ekonomi-multilateral-yang-terbuka-adil-inklusif-dan-berpusat-pada-rakyat>
- Min-ho, J. (2025, November 2). Gyeongju Declaration cements Korea's leadership amid US-China rivalry. *TheKoreaTimes*.  
<https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/20251102/gyeongju-declaration-cements-koreas-leadership-amid-us-china-rivalry>
- Nasution, R. (2025, June 3). Indonesia reaffirms commitment to multilateral trade at WTO. *Antaranews.com*. <https://en.antaranews.com/news/357817/indonesia-reaffirms-commitment-to-multilateral-trade-at-wto>
- Rahayu, I.R.S. & Djumena, E. (2025, Juni 5). Indonesia dukung reformasi WTO, Ini alasannya. *Kompas.com*.  
<https://money.kompas.com/read/2025/06/05/122100726/indonesia-dukung-reformasi-wto-ini-alasannya>
- Seungseop, S. (2025, October 29). Global leaders gather in Gyeongju...President Lee: "Korea will lead multilateralism". *TheAsiaBusinessDaily*.  
<https://www.asiae.co.kr/en/article/2025102910345248980?>

